



Pengaruh Implementasi Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi empiris Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat)

Mirna Lirda¹, Rice Haryati², Delori Nancy Meyla³

¹ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: mirnalirda@gmail.com

² Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Corresponding Author: Mirna Lirda

Abstract: *This study aims to examine the effect of Budget Implementation, Reporting System and Budget Accountability on the Performance Accountability of Government Agencies. The population in this study were 31 respondents in the West Sumatera Provincial Office. The sample in this study were 31 respondents in the West Sumatera Provincial Office. The sampling technique is total sampling, which is taking the entire population as a sample. The data used is primary data which is the source of research data obtained by researchers directly from the source of the research location or original source without going through intermediaries. The data analysis used is multiple linear regression analysis using SPSS 23. The results of this study indicate that Budget Implementation has a negative and significant effect on the Performance Accountability of Government Agencies, the Reporting System has a positive and significant effect on the Performance Accountability of Government Agencies and Budget Accountability has a positive and insignificant effect on Accountability for Performance of Government Agencies. Meanwhile, simultaneously the Performance Accountability of Government Agencies.*

Keywords: *Budget Implementation, Reporting System, Budget Accountability, Performance Accountability of Government Agencies.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Implementasi Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 31 responden di Kantor Dinas Provinsi Sumatera Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah 31 responden di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampel adalah Total Sampling yaitu pengambilan seluruh populasi sebagai sampel. Data yang digunakan adalah data primer yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber

lokasi penelitian atau sumber asli tanpa melalui perantara. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan secara simultan Implementasi Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kata Kunci: Implementasi Anggaran, Sistem Pelaporan, Pertanggungjawaban Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Anggaran sektor publik adalah suatu instrumen Akuntabilitas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program – Program yang dibiayai oleh dana publik. Anggaran adalah manajemen dalam perencanaan untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi baru. (Mardiasmo. 2018:61) Reformasi pengelolaan keuangan negara diindonesia yang diawali dengan keluarnya undang – undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah membawa banyak perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan negara.

Kinerja adalah suatu kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan suatu sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dijelaskan dalam strategic planning suatu organisasi. kinerja digunakan untuk menyebut prestasi dan apabila anggota atau karyawannya baik dan berkualitas, maka kinerja pemerintah daerah akan menjadi baik dan berkualitas juga (Mohamad Mahsun, 2012:25).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam peraturan presiden Nomor 29 tahun 2014 Bab I ketentuan umum pasal 1 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan Sakip.

Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah suatu prosedur yang direncanakan untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Melalui media inilah secara formal dapat dilakukan pertanggungjawaban dan memberikan keterangan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukan fokus perbaikan kinerja masa yang akan datang. Penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi, independensi dan akuntabilitas manajemen sektor publik.

Fenomena masalah kinerja instansi pemerintah daerah merupakan hal yang rutin terjadi. Seperti kasus Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat terkait Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan nilai C terhadap kinerja Pemkab Bandung Barat. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Implementasi Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat)”

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yang akan diberikan kepada responden, yaitu Bagian Keuangan diDinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat). Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, yang merupakan sumber data penelitian yang di peroleh peneliti secara langsung dari sumber lokasi penelitian atau sumber asli tanpa melalui perantara. Data primer penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden pada lokasi penelitian yang telah ditetapkan.

Uji validitas berarti uji yang digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Jika validitas ingin mengukur apakah pertanyaan yang dalam kuesioner yang telah kita buat betul – betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur (Ghozali, 2016). Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha dengan kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh Ghozali (2016: 43), yaitu jika koefisien Cronbach Alpha $> 0,7$ maka pernyataan dinyatakan andal. Sebaliknya, jika koefisien Cronbach Alpha $< 0,7$ (Ghozali, 2016).

Menurut Agussalim (2017) Uji t adalah pengujian secara parsial antara variabel independent terhadap variabel dependent. Uji t bertujuan untuk menunjukkan pengaruh atas variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Uji t ini dilakukan dengan cara membandingkan tingkat signifikansi dengan α . Jika tingkat signifikansi $< \alpha = 5\%$ maka hipotesis diterima dan sebaliknya, jika tingkat signifikansi $> \alpha = 5\%$ maka hipotesis ditolak (Ghozali, 2016). Uji pengaruh simultan (uji statistik F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Pengujiannya yaitu dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan derajat kebebasan pada alpha 0,05. Uji F dilakukan dengan uji ANOVA dengan pengambilan keputusan yaitu apabila F lebih besar dari α maka H_0 ditolak dan H_A diterima dengan derajat kepercayaan 5%.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Variabel	Hasil
Implementasi Anggaran	Valid
Sistem Pelaporan	Valid
Pertanggungjawaban Anggaran	Valid

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Valid
---	-------

b. Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Cut Off	Kesimpulan
Implementasi Anggaran (X1)	0,755	0,60	Reliable
Sistem Pelaporan (X2)	0,761	0,60	Reliable
Pertanggungjawaban Anggaran (X3)	0,754	0,60	Reliable
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0,730	0,60	Reliable

Berdasarkan tabel terlihat bahwa masing-masing variabel penelitian yang digunakan terdiri dari implementasi anggaran, sistem pelaporan, pertanggungjawaban anggaran, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah memiliki cronbach alpha di atas 0,60. Jadi kesimpulannya bahwa seluruh butir pertanyaan yang ada didalam kuesioner yang digunakan reliable sehingga tahapan pengolahan data segera dilaksanakan.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,21828288
Most Extreme Differences	Absolute	,094
	Positive	,061
	Negative	-,094
Test Statistic		,094
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200c,d

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Uji Normalitas Uji normalitas dipergunakan untuk menguji nilai residual yang dihasilkan dari regresi terlaksanakan secara normal atau tidak. nilai residual yang terdistribusi secara normal adalah Model regresi yang baik. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS 23 dalam mengolah data, salah satunya dengan uji One-Sample Kolmogorov Smirnov.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20,900	6,086		3,434	,002

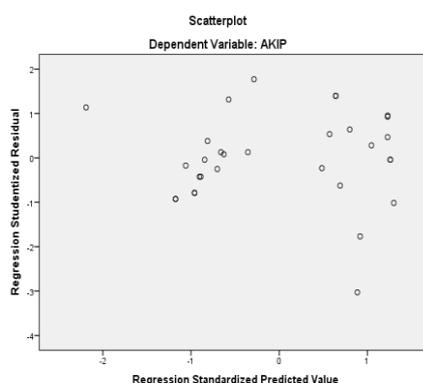
Implementasi Anggaran	,616	,235	,435	-2,620	,014
Sistem Pelaporan	,761	,155	,922	4,912	,000
Pertanggungjawaban Anggaran	,332	,166	,265	2,001	,055

a. Dependent Variable: AKIP

b. Uji Multikolinearitas

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semua nilai tolerance > 0,10 dan hasil perhitungan nilai VIF t tabel 2,052 dengan tingkat signifikan sebesar 0,014 dimana taraf signifikan t tabel 2,052 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 dimana taraf signifikan 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa H3 ditolak, artinya Pertanggung Jawaban Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

c. Uji Heterokedastisitas



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi sebab tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat dikatakan uji heterokedastisitas terpenuhi.

3. Metode Analisis Data

a. Uji Regresi Linear Berganda

Hasil pengolahan data yang terlihat pada kolom *Unstandardized Coefficients* bagian B diperoleh model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 20,900 - 0,616X1 + 0,761X2 + 0,332X3 + e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Nilai Konstanta sebesar 20,900 menunjukkan harga konstan, dimana jika tidak ada implementasi anggaran, sistem pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) adalah sebesar 20,900.
- 2) Koefisien regresi variabel implementasi anggaran (X1) sebesar -0,616, menunjukkan bahwa jika terjadi penurunan variabel implementasi anggaran satu poin maka akan menurun pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) sebesar -0,616 satuan apabila variabel independen konstan.
- 3) koefisien regresi variabel sistem pelaporan (X2) sebesar 0,761 ditingkatkan sebesar satu satuan, dengan asumsi implementasi anggaran (X1) dan pertanggungjawaban anggaran (X3) diabaikan, maka akan mengakibatkan kenaikan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (Y) sebesar 0,761 satuan dengan anggapan variabel implementasi anggaran (X1)dan pertanggungjawaban anggaran (X3) adalah tetap atau konstan .

- 4) koefisien regresi pertanggungjawaban anggaran (X3) sebesar 0,332 ditingkatkan sebesar satu satuan, dengan asumsi implementasi anggaran (X1) dan sistem pelaporan (X2) diabaikan, maka akan mengakibatkan kenaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) sebesar 0,332 satuan dengan anggapan variabel implementasi anggaran (X1)dan sistem pelaporan (X3) adalah tetap atau konstan.

b. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,832a	,692	,657	2,33828

Predictors: (Constant), Pertanggungjawaban Anggaran, Implementasi Anggaran, Sistem Pelaporan

b. Dependent Variable: AKIP

Pada tabel diatas diperoleh nilai R Square atau koefisien determinasi sebesar 0,692 akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel dependen berkontribusi implementasi anggaran, sistem pelaporan,dan pertanggung jawaban anggaran sebesar 69,2%, sedangkan sisanya 30,8% merupakan hasil yang dipengaruhi oleh faktor lain.

4. Metode Pengujian Hipotesis

a. Uji t

Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 31 orang, maka nilai t tabel dapat diperoleh melalui tingkat kepercayaan (a) di bagi 2 ; dengan total responden (n) di kurangi jumlah variabel (k) di kurangi satu = $t [a/2 ; n-t-1] = t[0.05/2 ; 31 - 3 - 1] = 0.025 ; 27 = 2,052$.

Dari Tabel Uji Parsial di atas dapat dianalisa sebagai berikut: Dari tabel diatas hasil perhitungan uji-t dapat diuraikan sebagai berikut:

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20,900	6,086		3,434	,002
	Implementasi Anggaran	-,616	,235	-,435	-2,620	,014
	Sistem Pelaporan	,761	,155	,922	4,912	,000
	Pertanggungjawaban Anggaran	,332	,166	,265	2,001	,055

a. Dependent Variable: AKIP

- 1) Hipotesa pertama diduga, Implementasi Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil uji-t diatas, diperoleh nilai t hitung sebesar $-2,620 > t$ tabel 2,052 dengan tingkat signifikan sebesar 0,014 dimana taraf signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima, artinya Implementasi Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- 2) Hipotesa kedua diduga, Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil uji-t diatas, diperoleh nilai t hitung sebesar $4,912 > t$ tabel $2,052$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,000$ dimana taraf signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima . Hal ini menunjukkan bahwa H_2 diterima, artinya Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Hipotesa ketiga diduga, Pertanggung Jawaban Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil uji-t diatas, diperoleh nilai t hitung sebesar $2,001 < t$ tabel $2,052$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,055$ dimana taraf signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 ditolak, artinya Pertanggung Jawaban Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Uji F

ANOVAa

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	331,086	3	110,362	20,185	,000b
	Residual	147,623	27	5,468		
	Total	478,710	30			

a. Dependent Variable: AKIP

b. Predictors: (Constant), Pertanggungjawaban Anggaran, Implementasi Anggaran, Sistem Pelaporan

Hipotesa keempat: Diduga bahwa Implementasi Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.

Dari tabel diatas, diperoleh nilai F sebesar $20,185 > F$ -tabel sebesar $2,95$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_4 diterima, artinya Implementasi Anggaran, Sistem Pelaporan, Pertanggung Jawaban Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pembahasan

1. Pengaruh Implementasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Implementasi Anggaran, diperoleh nilai $-2.620 > t$ tabel $2,052$ dengan tingkat signifikansi 0.014 dimana nilai signifikannya < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima, artinya Implementasi Anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

2. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Sistem Pelaporan, diperoleh nilai $4,912 > t$ tabel $2,052$ dengan tingkat signifikansi 0.000 dimana nilai signifikannya < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. hal ini menunjukkan bahwa H_2 diterima, artinya Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika pelaporan yang dilakukan semakin besar, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan pelaporan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran.

3. Pengaruh Pertanggungjawaban anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Pertanggungjawaban anggaran, diperoleh nilai $2,001 < t$ tabel $2,052$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,055$ dimana nilai signifikannya $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 ditolak, artinya Pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

4. Pengaruh Implementasi Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian F hitung diatas, diperoleh nilai F sebesar $20,185 > f_{\text{-tabel}}$ sebesar $2,95$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa h_4 diterima, artinya Implementasi Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengujian hipotesis yang keempat yaitu Implementasi Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka hasil yang diperoleh adalah hipotesis keempat **diterima**.

KESIMPULAN

Berdasarkan kepada analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan di dalam penelitian ini yaitu: 1. Variabel Implementasi Anggaran, diperoleh nilai $-2,620 > t$ tabel $2,052$ dengan tingkat signifikansi $0,014$ dimana nilai signifikannya $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima, artinya Implementasi Anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. 2. Variabel Sistem Pelaporan, diperoleh nilai $4,912 > t$ tabel $2,052$ dengan tingkat signifikansi $0,000$ dimana nilai signifikannya $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. hal ini menunjukkan bahwa H_2 diterima, artinya Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. 3. Variabel Pertanggungjawaban anggaran, diperoleh nilai t hitung $2,001 < t$ tabel $2,052$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,055$ dimana nilai signifikannya $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. hal ini menunjukkan bahwa H_3 ditolak, artinya Pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. 4. Berdasarkan hasil pengujian F hitung diatas, diperoleh nilai F sebesar $20,185 > f_{\text{-tabel}}$ sebesar $2,95$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 <$

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_4 diterima, artinya Implementasi Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

REFERENSI

- Ajo Pleno. 2018. "Terkait pengembangan Akuntabilitas kinerja pemerintah limapuluh kota targetkan nilai LAKIP meningkat". Ppid.Limapulukotakab.go.id
- Andriani, Wiwik & Hatta Ermataty. 2012. *Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi Pada Politeknik Negeri Padang)*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vo.7 No. 2, Desember, ISSN 1858- 3687, Hal 24-35.
- Anjarwati Mei (2012). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Vol. 1, No, 2, ISSN 2252-6765
- Ardan Adhi Chandra. 2018. "Dana pusat dan daerah rp 392 triliun tak jelas sasarannya". Detikfinance.com, 19 maret 2018
- Awang Darmawan. 2018. "Sekda luwu timur tuntutan peningkatan Akuntabilitas pemerintah". Sulselsatu.com, 12 April 2018
- Bastian, Indra.(2010) *Akuntansi Sektor Publik, suatu pengantar*. Edisi ketiga. Jakarta : Erlangga
- Bastian, Indra.2012. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Jakarta:Salemba Empat.
- BPKP. (2016). *Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi Keenam. Bogor. Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengawasan BPKP
- Endrayani Sri Komang, Dkk. (2014) *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah*. Vol 2. No 1.
- Friska Yulia, Indriani (2014) *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi)*. Tesis. UNJA.
- Ghozali, Imam, 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS*. Edisi Kedelapan. Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haspiarti. 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Parepare)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- <http://www.balebandung.com/kinerja-pemkab-bandung-barat-dinilai-buruk>
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentang *Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Mahmudi. (2006). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo.2010.*Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Penerbit ANDI.
- Mardiasmo.2018.*Akuntansi Sektor Publik* . Yogyakarta:Penerbit ANDI.
- Muhammad Nur Rochmi.2018."Kinerja pemerintah masih rendah". Beritatangar. com, 1 Desember 2017
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.

- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pusdiklatwas BPKP.2016. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi 8. Jakarta.
- Redakan Antar.2018. “ Rp285 miliar dana disdik sumbar mengendap”.Harian haluan.com, 09 Maret 2018.
- Seto Wibisono (2016). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Vol 5, No 2, ISSN: 2460-0585
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta.
- Susilowati, Harini. (2014). *Pengaruh Kejelasan Sasaran anggaran Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Motivasi Kerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiyono, 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tera Subakti. 2018. “Penggangan masih menjadi masalah” . Media Indonesia, 23 November 2017
- Wahdatul laura, Dkk. (2016). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung*. Vol 3, No 2, ISSN: 2355-9357
- Wahyuni, Dkk (2014). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (Pada Satu Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)*. Vol.1.No.1.
- Wijayanti, Anita Wahyu, 2012. *Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan. Tesis Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang*.
- Yulianti, Reni. (2014). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan.)*. FEKON. Vol.1 no.2 Oktober
- ZainalRum.2018.”Raperda Pertanggungjawabkan APBD disepakati”,sisa anggaran disorot tajam”, 25 Mei 2018